



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS INDONESIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SEMIARTO AJI PURWANTO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 851896

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.323.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah Seluas 561 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.122.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.207.600.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 522 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 1.244.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 399.000.000

1. MOTOR, ROYAL ENFIELD BULLET CLASSIC 350 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 79.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 370.800.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 182.247.717

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 8.275.647.717



III. HUTANG

Rp. 548.558.639

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.727.089.078

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.